

SEJARAH ISLAM BENGKULU PADA MASA ORDE LAMA (1945–1966)

Alyah Macuri ^{*1}
Saleha Amiroh ²
Refileli ³

^{1,2,3} Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

*e-mail : alyahmacuri@gmail.com ¹, amirohsaleha3@gmail.com ², refileli78@gmail.com ³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika perkembangan Islam di Bengkulu pada periode Orde Lama (1945–1966). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi politik, sosial keagamaan, ekonomi, dan pendidikan di Bengkulu pada masa tersebut. Metode yang digunakan adalah metode sejarah kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi sistem politik nasional dari demokrasi parlementer menuju Demokrasi Terpimpin berdampak signifikan terhadap stabilitas politik di daerah Bengkulu. Meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran krusial dalam pembinaan pendidikan dan masyarakat. Selain itu, sektor ekonomi masyarakat tetap bertumpu pada pertanian tradisional dengan pola solidaritas sosial yang kuat. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa masa Orde Lama menjadi fase formatif yang meletakkan fondasi bagi perkembangan identitas keislaman dan pembangunan daerah Bengkulu pada masa selanjutnya.

Kata Kunci: Sejarah Islam, Bengkulu, Orde Lama, Pendidikan Islam, Sosial Keagamaan.

Abstract

This study analyzes the dynamics of Islamic development in Bengkulu during the Old Order period (1945–1966). The purpose of this research is to describe the political, socio-religious, economic, and educational conditions in Bengkulu during that era. The method used in this study is a qualitative historical method through a literature study approach. The results show that the transition of the national political system from parliamentary democracy to Guided Democracy had a significant impact on political stability in the Bengkulu region. Despite limitations in facilities and infrastructure, religious organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama played a crucial role in the development of education and society. In addition, the community's economic sector remained dependent on traditional agriculture with strong patterns of social solidarity. The study concludes that the Old Order period became a formative phase that laid the foundation for the development of Islamic identity and regional development in Bengkulu in subsequent periods.

Keywords: Islamic History, Bengkulu, Old Order, Islamic Education, Socio-Religious Affairs

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Bengkulu merupakan manifestasi dari proses akulturasi budaya dan syariat yang berlangsung selama berabad-abad. Islam di wilayah ini tidak sekadar hadir sebagai sistem keyakinan, melainkan juga menjadi fondasi bagi tata nilai sosial dan karakter masyarakat. Studi mengenai perkembangan sejarah daerah, khususnya di Bengkulu, menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai keislaman tersebut berinteraksi dengan dinamika perubahan zaman. Penting untuk melihat bagaimana jejak sejarah tersebut tercatat dan dipahami dalam perspektif pembangunan daerah yang berkelanjutan (Universitas Bengkulu, 2005).

Periode Orde Lama (1945–1966) menjadi titik balik krusial dalam lini masa sejarah di Bengkulu. Masa ini ditandai dengan transisi politik yang kompleks, mulai dari masa demokrasi parlementer hingga penerapan Demokrasi Terpimpin. Perubahan struktur kekuasaan di tingkat nasional tersebut berdampak langsung terhadap peta kebijakan publik, termasuk dalam sektor keagamaan dan pendidikan di daerah. Literatur sejarah lokal mencatat bahwa adaptasi masyarakat Bengkulu terhadap perubahan ini tidak berjalan secara linear, melainkan melalui proses negosiasi sosial yang intens (Tim Peneliti BPNB Sumatera Barat, 2010).

Tantangan utama dalam rekonstruksi sejarah lokal Bengkulu adalah keterbatasan arsip yang terstruktur mengenai kehidupan sosial masyarakat pada periode tersebut. Sebagian besar dokumentasi yang tersedia masih bersifat umum, seperti data statistik kependudukan atau laporan pendidikan yang bersifat administratif (Kanwil Depag Provinsi Bengkulu, 1992; BPS Provinsi Bengkulu, berbagai tahun). Minimnya narasi mendalam mengenai peran tokoh lokal, dinamika organisasi keagamaan, serta pola interaksi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi politik menyisakan celah pengetahuan yang signifikan bagi studi sejarah daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini mengisi celah historiografi dengan mengkaji perkembangan Islam di Bengkulu secara tematis dan sistematis. Kajian ini tidak hanya memaparkan kronologi peristiwa, melainkan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan peran organisasi keagamaan berinteraksi dalam membentuk karakter masyarakat pada masa Orde Lama. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya masyarakat dalam mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan dan peran ulama di tengah keterbatasan sarana prasarana serta tekanan politik (Nasution, 1995; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980).

Melalui pendekatan sejarah yang objektif, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis akurat mengenai realitas sosial keagamaan di Bengkulu pada kurun waktu 1945–1966. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan studi sejarah lokal, sekaligus memperkaya referensi mengenai sejarah perkembangan Islam di luar pusat kekuasaan utama di Pulau Jawa.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi mengenai sejarah Islam di Indonesia secara teoretis menempatkan agama bukan hanya sebagai sistem ritual, melainkan sebagai kekuatan penggerak bagi perubahan sosial dan politik. Deliar Noer (1980) dalam analisisnya mengenai gerakan modern Islam menekankan bahwa keterlibatan organisasi keagamaan merupakan bentuk respons masyarakat terhadap tantangan zaman dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dalam konteks sejarah nasional, perspektif ini memberikan landasan fundamental untuk memahami bahwa perkembangan Islam di daerah, termasuk Bengkulu, merupakan cerminan dari interaksi antara ajaran agama dengan kondisi sosiopolitik yang terjadi secara makro. Dinamika ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis sebagai stabilisator sosial di tengah arus perubahan struktur kekuasaan.

Dalam kerangka metodologi sejarah, Kuntowijoyo (2005) menyatakan bahwa setiap perubahan dalam struktur kekuasaan nasional seperti transisi dari demokrasi parlementer ke Demokrasi Terpimpin pada era Orde Lama memiliki dampak sistemik terhadap struktur sosial di tingkat lokal. Variabel sejarah ini menjadi instrumen utama dalam penelitian ini untuk membedah bagaimana kebijakan pemerintah pusat mengenai sentralisasi kekuasaan memengaruhi otonomi lembaga pendidikan Islam di Bengkulu. Analisis ini difokuskan pada pola adaptasi organisasi keagamaan dalam menghadapi fluktuasi kebijakan politik periode 1945–1966, yang menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan aktivitas pendidikan dan pembinaan umat di masyarakat lokal.

Terkait dengan literatur yang tersedia, penelitian sejarah di Bengkulu telah banyak didokumentasikan oleh berbagai instansi. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu (1992) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (1995) telah menyediakan data administratif mengenai kronologi dan perkembangan lembaga keagamaan serta pendidikan formal di daerah tersebut. Selain itu, kajian sejarah sosial budaya yang dilakukan oleh Tim Peneliti BPNB Sumatera Barat (2010) serta perspektif pembangunan dari Universitas Bengkulu (2005) memberikan gambaran umum mengenai sejarah daerah dan konteks pembangunan di Bengkulu. Meskipun demikian, literatur-literatur tersebut cenderung bersifat deskriptif-administratif dan belum secara mendalam mengintegrasikan faktor politik nasional sebagai variabel utama dalam menganalisis ketahanan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah (*gap*) tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih tajam mengenai bagaimana dinamika politik pada masa Orde Lama memengaruhi realitas sosial keagamaan di Bengkulu secara spesifik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah kualitatif guna merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Metode sejarah dipilih karena relevan dalam menelusuri alur kronologis serta menganalisis pola perubahan sosial masyarakat Bengkulu pada periode 1945–1966. Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama, yakni *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama adalah *heuristik* atau pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen arsip, laporan instansi pemerintah seperti Kantor Wilayah Departemen Agama dan Dinas Pendidikan, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu yang merekam kondisi sosial dan pendidikan pada masa Orde Lama. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku referensi sejarah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dinamika politik dan perkembangan Islam di Indonesia.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang berfungsi untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Proses ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian fisik dokumen, seperti tahun penerbitan, otoritas penulis, dan konteks pembuatan dokumen tersebut. Selanjutnya, kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas konten informasi yang terkandung di dalam dokumen. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa fakta sejarah yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi objektif di Bengkulu pada kurun waktu yang diteliti, serta meminimalisir bias subjektif dari sumber sejarah yang digunakan.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang telah teruji kebenarannya dihubungkan satu sama lain untuk membentuk sebuah alur peristiwa yang logis. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat antara dinamika politik nasional dengan dampaknya terhadap kondisi sosial keagamaan dan pendidikan di tingkat lokal Bengkulu. Analisis ini bersifat sintetik, di mana data yang terfragmentasi disusun kembali menjadi narasi sejarah yang utuh dan komprehensif.

Tahap akhir penelitian adalah historiografi. Hasil dari proses interpretasi disusun ke dalam bentuk tulisan naratif yang sistematis sesuai dengan kaidah penulisan akademis. Penulisan historiografi ini tidak hanya memaparkan kronologi peristiwa, tetapi juga menyajikan argumen sejarah yang objektif dan argumentatif. Seluruh rangkaian proses ini memastikan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi standar penulisan karya ilmiah sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik di Bengkulu pada Masa Orde Lama

1. Gambaran Umum Dinamika Politik Era Orde Lama

Era Orde Lama (1945–1966) merupakan periode krusial dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, dari Demokrasi Parlementer (1945–1959) menuju Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Perubahan struktur kekuasaan ini dipicu oleh dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara efektif membubarkan Konstituante dan mengembalikan Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 (Budiardjo, 2008). Pada skala nasional, lanskap politik didominasi oleh konstelasi kekuatan partai-partai besar, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dinamika politik di pusat kekuasaan ini memiliki korelasi langsung dan signifikan terhadap perkembangan politik di tingkat daerah, termasuk Bengkulu, di mana kebijakan nasional sering kali memicu pergeseran pola interaksi sosial-politik lokal (Feith, 1962).

2. Kondisi Politik Bengkulu pada Fase Awal Kemerdekaan (1945–1950)

Pada periode awal pasca-Proklamasi, Bengkulu berada dalam fase konsolidasi pemerintahan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Secara historis, Bengkulu

memiliki kedekatan ideologis dengan pusat perjuangan nasional, terutama karena wilayah ini pernah menjadi tempat pengasingan Soekarno antara tahun 1938 hingga 1942 (Kartodirdjo, 1993). Kehadiran Soekarno di Bengkulu pada masa kolonial bukan sekadar catatan sejarah, melainkan faktor yang secara signifikan membentuk kesadaran nasionalisme dan basis dukungan politik bagi Soekarno di masyarakat setempat (Adams, 2007). Pasca-1945, tokoh-tokoh lokal Bengkulu segera mengambil peran dalam membentuk struktur pemerintahan daerah dan menjaga stabilitas keamanan. Meskipun struktur pemerintahan baru dibentuk sesuai mandat pusat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa otoritas lokal sering kali harus bekerja di tengah keterbatasan sumber daya logistik dan ketidakstabilan politik yang masih tinggi akibat sisa-sisa pengaruh kolonial serta dinamika transisi kekuasaan.

3. Dinamika dan Polarisasi Partai Politik (1950–1959)

Memasuki era Demokrasi Parlementer, kehidupan politik di Bengkulu mengalami diversifikasi dengan hadirnya partai-partai politik nasional yang memiliki basis massa yang kuat. Partai-partai seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI berkompetisi secara aktif dalam memengaruhi opini publik dan kebijakan daerah (Noer, 1987). Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1955 menjadi titik kulminasi partisipasi politik masyarakat Bengkulu, di mana warga secara aktif menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan anggota DPR dan Konstituante. Fenomena ini tidak hanya mendorong peningkatan literasi politik, tetapi juga memicu polarisasi ideologi yang tajam antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis (Feith, 1999). Munculnya elite politik lokal di lembaga legislatif dan eksekutif daerah semakin memperkuat posisi Bengkulu dalam peta politik nasional. Namun, efektivitas pemerintahan daerah sering kali terhambat oleh konflik kepentingan antarpolitical yang mencerminkan pertentangan politik di tingkat pusat, sehingga stabilitas daerah menjadi sangat fluktuatif.

4. Bengkulu di Bawah Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Peralihan sistem politik menuju Demokrasi Terpimpin pasca-Dekrit Presiden 1959 membawa perubahan struktur kekuasaan yang lebih terpusat. Pada periode ini, otoritas Presiden Soekarno menjadi sangat dominan, yang berdampak pada pembatasan ruang gerak partai politik (Budiardjo, 2008). Di Bengkulu, kebijakan politik praktis lebih banyak dikendalikan langsung oleh instruksi pemerintah pusat. Salah satu perubahan paling mencolok adalah menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui berbagai organisasi massa yang menyusup ke dalam ranah sosial dan politik daerah. Dominasi ini memicu ketegangan laten dengan kelompok nasionalis dan umat Islam di Bengkulu yang merasa kebijakan tersebut mengancam tatanan sosial tradisional. Puncak dari ketegangan ideologis ini adalah peristiwa G30S pada tahun 1965, yang membawa dampak destruktif bagi tatanan politik di Bengkulu. Pasca-peristiwa tersebut, terjadi pembersihan dan pembubaran organisasi yang terafiliasi dengan PKI, yang sekaligus menandai perubahan struktur kekuasaan daerah sebagai bagian dari proses transisi panjang menuju masa Orde Baru (Notosusanto, 1984).

5. Dampak Politik terhadap Kehidupan Masyarakat

Dinamika politik era Orde Lama di Bengkulu meninggalkan dampak yang mendalam dan multidimensi. Secara positif, periode ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Namun, polarisasi ideologi yang tajam sering kali menciptakan fragmentasi dalam struktur sosial masyarakat. Birokrasi di daerah pun dipaksa untuk terus beradaptasi dengan kebijakan yang sering kali berubah-ubah dari pemerintah pusat, sementara kondisi ekonomi daerah yang tidak stabil memperparah ketimpangan sosial akibat dinamika politik tersebut (Kartodirdjo, 1993). Meskipun demikian, periode ini tetap dipandang sebagai fase formatif bagi Bengkulu dalam mengukuhkan posisinya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun harus melalui berbagai proses negosiasi politik dan tantangan stabilitas yang kompleks.

B. Kondisi Sosial Keagamaan di Bengkulu Masa Orde Lama

1. Dinamika Sosial Keagamaan dalam Konteks Nasional

Masa Orde Lama (1945–1966) merupakan fase formatif dalam kristalisasi identitas keagamaan di Indonesia. Pada periode ini, agama menempati posisi strategis sebagai instrumen integrasi sosial di tengah gejolak politik nasional. Negara secara resmi mengakui keberadaan

berbagai agama, yang kemudian menempatkan kehidupan keagamaan di daerah dalam ruang lingkup dinamika politik nasional yang kompleks (Budiardjo, 2008). Di Bengkulu, kebijakan politik nasional, khususnya pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), memberikan implikasi langsung terhadap tatanan sosial masyarakat. Hubungan trikotomi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis menjadi penentu utama pola interaksi sosial masyarakat setempat (Feith, 1962).

2. Penguatan Institusi dan Perkembangan Islam

Masyarakat Bengkulu secara demografis didominasi oleh penduduk beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman menjadi arus utama dalam pembentukan struktur sosial. Pendidikan Islam melalui madrasah dan pesantren mengalami perkembangan signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan pembinaan umat, meskipun operasionalnya menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar (Azra, 1999). Peran organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sangat krusial. Muhammadiyah secara progresif mengintegrasikan modernisasi pemikiran Islam melalui pendidikan formal, sementara Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga keberlangsungan tradisi pesantren dan amaliah keagamaan tradisional yang mengakar kuat di masyarakat (Noer, 1982). Selain itu, intensitas kegiatan pengajian dan pembangunan masjid menjadi indikator vital menguatnya solidaritas sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Gotong royong di Bengkulu pada masa ini tidak hanya bersifat sekular, tetapi memiliki fondasi religius yang kokoh (Noer, 1982).

3. Interaksi Antara Agama dan Politik

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), keterlibatan partai politik berbasis Islam, seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama, menunjukkan bahwa agama merupakan variabel penting dalam aktivitas politik daerah (Noer, 1987). Namun, situasi berubah drastis memasuki era Demokrasi Terpimpin. Munculnya rivalitas ideologis antara organisasi keagamaan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menciptakan ketegangan yang nyata di masyarakat. Fenomena ini memicu kecurigaan dan persaingan pengaruh yang meluas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bengkulu (Mortimer, 1974). Meskipun eskalasi konflik tidak mencapai tingkat yang ekstrem sebagaimana di beberapa pusat politik lainnya, dinamika nasional ini tetap memengaruhi kohesi sosial. Peristiwa 1965 menjadi titik balik signifikan; pembubaran PKI dan penurunan pengaruh kelompok kiri secara drastis mengubah lanskap sosial keagamaan di Bengkulu, yang kemudian memperkuat posisi organisasi keagamaan sebagai pilar moral masyarakat (Notosusanto, 1984).

4. Tradisi Keagamaan dan Toleransi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Bengkulu dicirikan oleh sinkretisme yang unik antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Praktik keagamaan tidak terlepas dari upacara adat yang memiliki nuansa religius, seperti peringatan Maulid Nabi dan kegiatan adat lainnya yang diislamkan secara kultural. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Bengkulu mampu mengadaptasi ajaran universal agama ke dalam konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Selain itu, toleransi antarumat beragama di Bengkulu terpelihara dengan relatif harmonis, meskipun terdapat komunitas pemeluk agama Kristen dan Katolik dalam skala kecil (Kementerian Agama RI, 1995). Dalam kondisi ekonomi yang cenderung tidak stabil dan penuh tantangan pada masa Orde Lama, nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai penopang moral dan mekanisme penyangga solidaritas sosial bagi masyarakat (Kartodirdjo, 1993).

5. Dampak Sosial Keagamaan

Secara sistematis, kondisi sosial keagamaan di Bengkulu pada era Orde Lama menghasilkan beberapa implikasi strategis. Pertama, terjadi penguatan peran organisasi keagamaan yang mengisi ruang sosial dan pendidikan yang tidak mampu dijangkau oleh pemerintah. Kedua, kesadaran akan identitas keagamaan masyarakat semakin terartikulasikan di tengah dinamika ideologi politik. Ketiga, terbentuknya pola toleransi sosial yang stabil meskipun berada di bawah tekanan perubahan politik nasional yang konstan. Secara keseluruhan, periode ini merupakan fondasi bagi perkembangan kehidupan keagamaan di Bengkulu yang lebih mapan pada masa-masa berikutnya.

C. Kondisi Ekonomi di Bengkulu Masa Orde Lama

1. Dinamika Ekonomi Nasional dan Dampak Regional

Periode Orde Lama (1945–1966) merupakan masa ketidakpastian ekonomi yang kronis di Indonesia, ditandai dengan hiperinflasi, defisit anggaran yang mendalam, serta transisi sistem ekonomi dari liberal ke arah ekonomi terpimpin. Kebijakan nasional yang menitikberatkan pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pasca-konflik Irian Barat menjadi titik balik utama pengelolaan sumber daya ekonomi negara (Onghokham, 1989). Namun, transisi ini tidak diimbangi dengan kesiapan manajerial dan kapabilitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan stagnasi produktivitas di berbagai daerah. Bengkulu, sebagai wilayah yang masih dalam fase pemulihan pasca-kemerdekaan, merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan makro ini melalui terhambatnya arus distribusi barang dan modal (Ricklefs, 2008).

2. Struktur Ekonomi Agraris Bengkulu

Secara struktural, ekonomi Bengkulu pada masa Orde Lama tetap berpijak pada sektor agraris. Sejak era kolonial, wilayah ini dikenal sebagai produsen komoditas perkebunan seperti lada dan kopi. Pada kurun waktu 1945–1966, sektor pertanian dan perkebunan rakyat menjadi tulang punggung ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 1994). Pola produksi di Bengkulu umumnya bersifat tradisional dengan skala kecil, di mana padi, kopi, dan lada menjadi komoditas dominan. Keterbatasan infrastruktur distribusi yang memadai menyebabkan hasil bumi sering kali sulit menembus pasar yang lebih luas, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat lebih banyak terfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal dan perdagangan barter sederhana.

3. Potensi Pertambangan dan Hambatan Struktural

Selain sektor pertanian, Bengkulu menyimpan potensi tambang yang signifikan, terutama emas di wilayah Lebong. Namun, pengelolaan potensi ini selama masa Orde Lama sangat jauh dari optimal. Ketiadaan modal investasi yang besar dan minimnya akses terhadap teknologi pengolahan modern menyebabkan sektor pertambangan tidak mampu menjadi penggerak ekonomi daerah (Kartodirdjo, 1993). Alhasil, kegiatan pertambangan di Bengkulu tetap berjalan dengan pola ekstraksi yang terbatas, tidak memberikan dampak ekonomi yang masif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk setempat secara signifikan.

4. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat

Kehidupan ekonomi masyarakat Bengkulu pada masa tersebut mencerminkan potret ekonomi subsisten. Mata pencaharian utama penduduk bertani, berkebun, dan berdagang di pasar tradisional menciptakan sistem perdagangan yang sangat bergantung pada arus komoditas lokal. Meski kondisi ekonomi makro negara tidak stabil, sistem sosial berbasis kekeluargaan dan budaya gotong royong menjadi mekanisme pertahanan utama bagi masyarakat (Kartodirdjo, 1993). Nilai-nilai solidaritas sosial inilah yang meminimalisir dampak gejolak ekonomi nasional terhadap kelangsungan hidup penduduk di tingkat desa dan komunitas lokal.

D. Kondisi Pendidikan di Bengkulu Masa Orde Lama

1. Tantangan Pendidikan Nasional dan Regional

Pendidikan pada masa Orde Lama mengemban misi ganda: sebagai sarana transfer ilmu dan sebagai instrumen ideologis untuk membentuk manusia berjiwa revolusioner dan nasionalis (Nasution, 1995). Namun, implementasi idealisme ini di daerah, termasuk Bengkulu, menghadapi rintangan struktural yang berat. Keterbatasan sarana pendidikan, minimnya jumlah guru yang berkualifikasi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif menyebabkan pembangunan pendidikan nasional tidak berjalan merata (Nasution, 1995). Di Bengkulu, sekolah-sekolah rakyat (SR) menjadi institusi yang paling dominan, namun akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan menengah tetap sangat terbatas (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 1994).

2. Peran Lembaga Keagamaan dalam Pendidikan

Keterbatasan jangkauan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan formal di Bengkulu direspons oleh organisasi keagamaan melalui pendirian institusi pendidikan berbasis Islam. Organisasi seperti Muhammadiyah memainkan peran krusial dengan mengintegrasikan kurikulum agama dan umum ke dalam madrasah-madrasah yang mereka kelola (Noer, 1980). Lembaga pendidikan Islam ini tidak sekadar menjadi pusat transmisi ajaran agama, tetapi juga

berfungsi sebagai institusi pendidikan alternatif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi oleh sekolah formal pemerintah. Peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menginisiasi surau sebagai pusat belajar dasar juga menjadi fondasi penting dalam menekan angka buta huruf di Bengkulu pada saat itu.

3. Kurikulum dan Ideologisasi Pendidikan

Arah kebijakan pendidikan Orde Lama di bawah Demokrasi Terpimpin sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme radikal. Kurikulum tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang loyal terhadap revolusi. Guru-guru di Bengkulu memiliki tanggung jawab ganda yaitu menuntaskan target kurikulum formal sekaligus menanamkan kesadaran nasionalisme kepada peserta didik (Tilaar, 1995). Meskipun demikian, dinamika politik yang sering bergejolak di tingkat nasional terkadang menciptakan atmosfer belajar-mengajar yang tidak stabil, di mana kebijakan pendidikan dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan pergeseran arah politik negara.

4. Hambatan Pembangunan Pendidikan

Secara empiris, rendahnya kualitas pendidikan di Bengkulu pada era Orde Lama disebabkan oleh empat faktor utama yaitu pertama, kurangnya guru berpendidikan formal menghambat standarisasi kualitas pengajaran. Kedua, banyak proses belajar mengajar berlangsung di bangunan sederhana dengan fasilitas yang jauh dari standar minimum (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 1994). Ketiga prioritas utama masyarakat pada sektor pertanian membuat pendidikan formal belum dipandang sebagai kebutuhan primer oleh sebagian besar penduduk. Keempat, tekanan politik nasional menjelang akhir masa Orde Lama berdampak langsung pada konsistensi kebijakan pendidikan daerah (Tilaar, 1995). Faktor-faktor inilah yang menyebabkan potret pendidikan di Bengkulu pada masa tersebut masih berada dalam fase pengembangan awal, yang meskipun tertinggal dibanding pusat, tetap menunjukkan daya tahan melalui kontribusi nyata organisasi keagamaan dan semangat masyarakat untuk belajar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah Islam di Bengkulu pada masa Orde Lama mencerminkan ketangguhan sosial yang signifikan di tengah ketidakstabilan sistem politik nasional. Peralihan daripada Demokrasi Parlementer kepada Demokrasi Terpimpin yang sentralistik memang mencetuskan marginalisasi otonomi daerah serta polarisasi ideologi, namun masyarakat Bengkulu berjaya mempertahankan integriti sosial melalui peranan institusi Islam sebagai pilar moral dan kohesi masyarakat. Kemandirian dalam mengurus pendidikan melalui madrasah dan pesantren, serta penguatan ekonomi berasaskan komuniti, membuktikan bahawa daya tahan daerah pada tempoh tersebut bersumber daripada modal sosial yang kuat, bukannya bergantung kepada sokongan dasar pusat yang berubah-ubah. Sehubungan itu, disarankan kepada pihak berwajib dan institusi pendidikan untuk mempercepat usaha pendokumentasian sejarah lokal sebagai langkah memperkukuh jati diri daerah. Pihak pendidik juga dicadangkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ketangguhan sosial dan kearifan tempatan ke dalam kurikulum sejarah bagi menyemai kesadaran generasi muda. Selain itu, kajian lanjutan yang lebih mendalam berasaskan arkib primer adalah perlu bagi membina narasi sejarah yang lebih komprehensif serta menjadi rujukan literasi sejarah yang tepat untuk masa hadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (t.t.). *Bengkulu dalam Angka*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). *Sejarah Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1980). *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. (1995). *Sejarah Perkembangan Pendidikan di Bengkulu*. Bengkulu: Disdikbud Provinsi Bengkulu.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu. (1992). *Sejarah Perkembangan Islam di Bengkulu*. Bengkulu: Kanwil Depag.

- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer, Deliar. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. (t.t.). *Profil Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pemda Provinsi Bengkulu.
- Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. London: Macmillan.
- Said, Mohammad. (1981). *Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tilaar, H.A.R. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945–1995*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat. (2010). *Sejarah Sosial Budaya Bengkulu*. Padang: BPNB.
- Universitas Bengkulu. (2005). *Bengkulu dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*. Bengkulu: UNIB Press.